

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bayu Suryaningrat, 1976, *Pemerintahan Dan Administrasi Desa*, Yayasan Beringin Korpri Unit Departemen Dalam Negeri, Bandung.
- Christine Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- HAW Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- , 2020, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moh Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nana Sudjana, 2008, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Permata Aksara, Bandung
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum Bandung*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soetandyo Wingnjoebroto , 2007, *Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah, Elsam & Huma*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subarsono, 2009, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharsini Harikunto, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Praktek* , Rineka Cipta, Jakarta.
- Surianingrat, 19912, *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Susilo Bambang Yudoyono,dkk, 2002, *Good Governance dan Otonomi Daerah (Menyongsong AFTA Tahun 2003)*, Kerjasama Prosumen dengan Forkoma-MAP UGM, Yogyakarta.

Syamsuddin Haris, 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPPI Pres, Jakarta.

Tabrani Rusyan, 2017, *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Nagari Persiapan Sungai Cubadak

Peraturan Bupati Agam Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Nagari Persiapan Koto Gadang

Peraturan Bupati Agam Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Kandih Lubuk Basung, Nagari Persiapan Sangkir Lubuk Basung, Nagari Persiapan Surabaya Lubuk Basung, Nagari Persiapan Parit Panjang Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung

Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nagari Persiapan.

c. Sumber Lainnya

Andika Wahyun Muqoyyidin, Jurnal Konstitusi, volume 10. No.2, Universitas Pesantren Tinggi Darul “Ulum, Jombang.

Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab”, Journal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2007, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Profil Kecamatan Baso, 2011, <https://www.Agamkab.go.id /Agam/Kab /Profil>

<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan>.

Laporan perkembangan Nagari Persiapan Koto Gadang tahun 2020, laporan semester.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>.

<https://www.agamkab.go.id/>

<https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/>

http://eprints.undip.ac.id/59983/2/BAB_1_SKRIPSI_FIX.pdf

Tata Wijayanta, 2014, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, Yogyakarta.

www.boyyendratamin.com/2012/01/jadikan-jorong-setingkat-desa

www.boyyendratamin.com/2016/12/nagari-di-sumatera-barat-sebagai.

www.boyyendratamin.com/2013/09/tata-kelola-pemerintahan-nagari-di-13.